

PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 3 September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Surabaya



Rachmad Basari
Rachmad Basari S.E., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196903231996021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG.....	6
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	12
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER (KRG) SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA).....	18
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.....	19
BAB VI. PENUTUP.....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90).
 8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
 9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
 10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
 11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelebagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah

kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025

4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang keuangan

Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi pembangunan daerah Kota Surabaya untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”

b. Misi

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam pencapaian Misi 4 Walikota dan Wakil Walikota yaitu “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”

c. Motto

Motto pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya adalah “Bapenda di hati” yang kepanjangannya:

1. Digitalisasi
2. Harmonis
3. Akuntabel
4. Transparan
5. Integritas

2.3 Demografi

Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dengan 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Tugas dan fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan dan Pajak Air Tanah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Parkir, Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

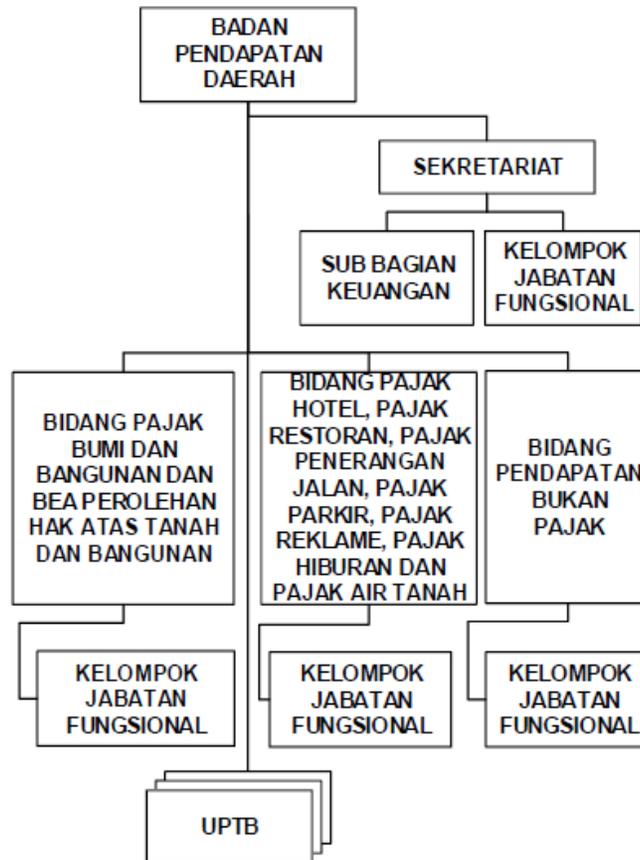
4. Bidang Pendapatan Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendapatan bukan pajak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Tugas UPTB adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya memiliki 5 UPTB dengan lokasi sebagai berikut:

- UPTB 1 → Jl. Tambak Rejo V / 3
- UPTB 2 → Jl. Rungkut Asri No. 22
- UPTB 3 → Jl. Raya Meganti Wiyung no. 247
- UPTB 4 → Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25
- UPTB 5 → Jl. Sukodami II No. 1



2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan Gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Badan Pendapatan Daerah tertuang pada:

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.
- b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2 /4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1paBGhDdooZ1U8JTXRyo4wF9OCaZjTTcm?usp=sharing>

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) sosialisasi PUG dilakukan sosialisasi sebagai berikut:

- a. Kamis, 9 Januari 2025, Desk Sub Kegiatan PUG dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Rabu, 23 April 2025, Internalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
- c. Rabu, 30 Juli 2025 Pertemuan Pokja PUG Semester II secara daring/zoom

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1tfdw_8L7rI4_DIL_ubR4vxlkX_Zz3UGt?usp=drive_link

2.4.3 SDM Terlatih PUG

1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Gogor Setyawan, A.Md	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat pelatihan
2	Atilla Sandra Novianti, S.A.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sertifikat pelatihan
3	Nanda Pamungkas, S.E	Pengolah Data dan Informasi	Sertifikat pelatihan
4	Rizky Heriawati, S.A	Pengolah Data dan Informasi	Sertifikat pelatihan
5	Riris Aditia Ningrum S.I.K	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sertifikat pelatihan
6	Yunita Intan Sari S.E.	Penata Layanan Operasional	Sertifikat pelatihan

Jumlah SDM Perencanaan dan penganggaran terlatih PUG	Jumlah SDM Bapenda	%
6	130	4,6%

2. Focal Point PUG

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan

Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Focal Point Bapenda	Keterangan
13	Kepala dinas, Sekretaris, Kepala Bidang , dan Ketua Tim Kerja

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1TVjeDOR3p2VJ_87_gTsoi44mhPfmITRN?usp=sharing

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

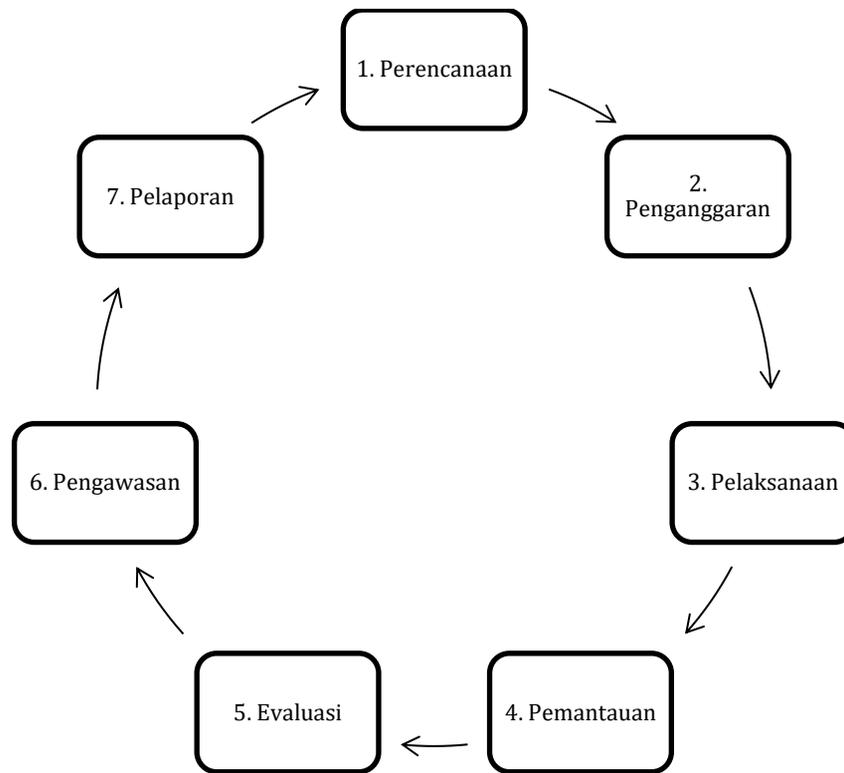
No	JENIS KETENAGAAN	ASN/ NON ASN	JUMLAH JENIS KELAMIN		JUMLAH TOTAL
			L	P	
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	ASN	1	0	1
2	Sekretaris	ASN	0	1	1
3	Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak	ASN	1	0	1
4	Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah	ASN	0	1	1
5	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	ASN	0	1	1
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	0	1	1
7	Ketua Tim Kerja Pendataan dan Penetapan	ASN	0	1	1
8	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pemeriksaan	ASN	0	1	1
9	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	ASN	1	0	1
10	Ketua Tim Kerja Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak	ASN	1	0	1
11	Ketua Tim Kerja Pendataan dan Pendaftaran	ASN	0	1	1

12	Ketua Tim Kerja Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	ASN	0	1	1
13	Kepala UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1	ASN	0	1	1
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1	ASN	0	1	1
15	Kepala UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2	ASN	1	0	1
16	Kepala UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3	ASN	1	0	1
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3	ASN	0	1	1
18	Kepala UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4	ASN	1	0	1
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4	ASN	1	0	1
20	Kepala UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5	ASN	0	1	1
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5	ASN	0	1	1
22	Staff	ASN	52	58	110
23	Staff	NON ASN	153	72	225
JUMLAH			213	143	356

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DMhVVO4tltSaVweZ-SlidsY_P6Jh0Jvm

BAB III
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

b. Renstra dan renja Badan Pendapatan Daerah

Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 yang diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender di Badan Pendapatan Daerah.

Isu-isu strategis dalam Badan Pendapatan Daerah: 1) Isu-isu gender dalam isu-isu strategis; 2) Besarnya jumlah piutang pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah; 3) Terjadinya perubahan dan perkembangan data OP dan WP; 4) Keterlambatan dan petunjuk teknis terkait Pendapatan Transfer yang senantiasa berubah.

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR)

Program/ kegiatan/ subkegiatan yang memberi manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan: ada 7 Subkegiatan yang memberi manfaat adil bagi Laki-laki dan Perempuan pada Tahun 2025.

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). terdapat 7 sub kegiatan tahun 2025 di Badan Pendapatan Daerah yang telah disusun GAP, GBS dan TORnya.

Adapun dokumen terdapat pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1g9fQnPZnY_AzwwTgm1k7QcXorVhvAg9j?usp=sharing

e. Alat analisis gender

Alat dan Tehnik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu

- Langkah pertama: Memilih kebijakan/ program/ kegiatan

- Langkah ke-2: Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif
- Langkah ke-3: Mengenal Isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4: Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
- Langkah ke-6: Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-7: Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8: Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9: Indikator gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan
 - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
 - Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026
 - Renja Badan Pendapatan Daerah
 - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2 /4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Gender (PUG) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
 - GAP,TOR, GBS

Adapun dokumen terdapat pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CubyaGHdf06-Vqp28-PFOBrR3w7-2JXA?usp=sharing>

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Badan Pendapatan Daerah, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.841.162.888

2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.887.838.420
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.040.768.331
4	Penagihan Pajak Daerah	2.771.775.116
5	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	237.514.507
6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	311.808.762
7	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	368.298.641
	TOTAL ANGGARAN	16.459.166.665

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

- a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

No	Bidang	Kegiatan
1	Politik	Wawasan terkait pentingnya taat pajak
2	Ekonomi	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk pembangunan kota
3	Sosial	Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan
4	Hukum	Sosialisasi Peraturan terkait pajak daerah kepada Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan
5	Lainnya	Kontribusi dalam pendanaan kegiatan pemberdayaan perempuan

- b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Badan Pendapatan Daerah adalah Dharma wanita dengan mengundang UMKM untuk memberikan pelatihan dalam rangka pemberdayaan perempuan.

- c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dengan membentuk Dharma wanita untuk dapat melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

- d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring

Ketersediaan sarana prasarana yang ramah perempuan dan anak seperti ruang laktasi.

e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan mengadakan yasinan rutin pegawai Bapenda dengan tausiah guna menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dengan membentuk Dharma wanita untuk dapat melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya mengadakan sosialisasi terkait pajak daerah dan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan

h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender

Menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak pada loket pelayanan pembayaran Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring

Sampai dengan saat ini, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada data di Badan Pendapatan Daerah

j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

No	Jenis Sarana	Ada/Tidak/ Jumlah	Kondisi
1	Kantor Badan Pendapatan Daerah	7	Baik
2	Toilet laki-laki dan perempuan	Ada	Baik
3	Ruang laktasi	Ada	Baik
5	Tempat Bermain Anak	Ada	Baik
4	Sarana prasarana penunjang (APAR, Keterangan titik kumpul/ jalur evakuasi, tempat sampah)	Ada	Baik

k. Pembinaan PUG Bapenda

Pembinaan PUG di Badan Pendapatan Daerah berupa penyusunan TOR, GAP dan GBS

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1efFK69wvNi9g0qyznQI3ayureHwS9gr6?usp=drive_link

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2 /4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. mengingat pelaksanaannya juga bersentuhan dengan penerimaan pajak daerah, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari tim anggaran, hasil pendampingan Inspektorat dan juga hasil pendampingan kejaksaan terkait dengan pengawasan objek pajak.

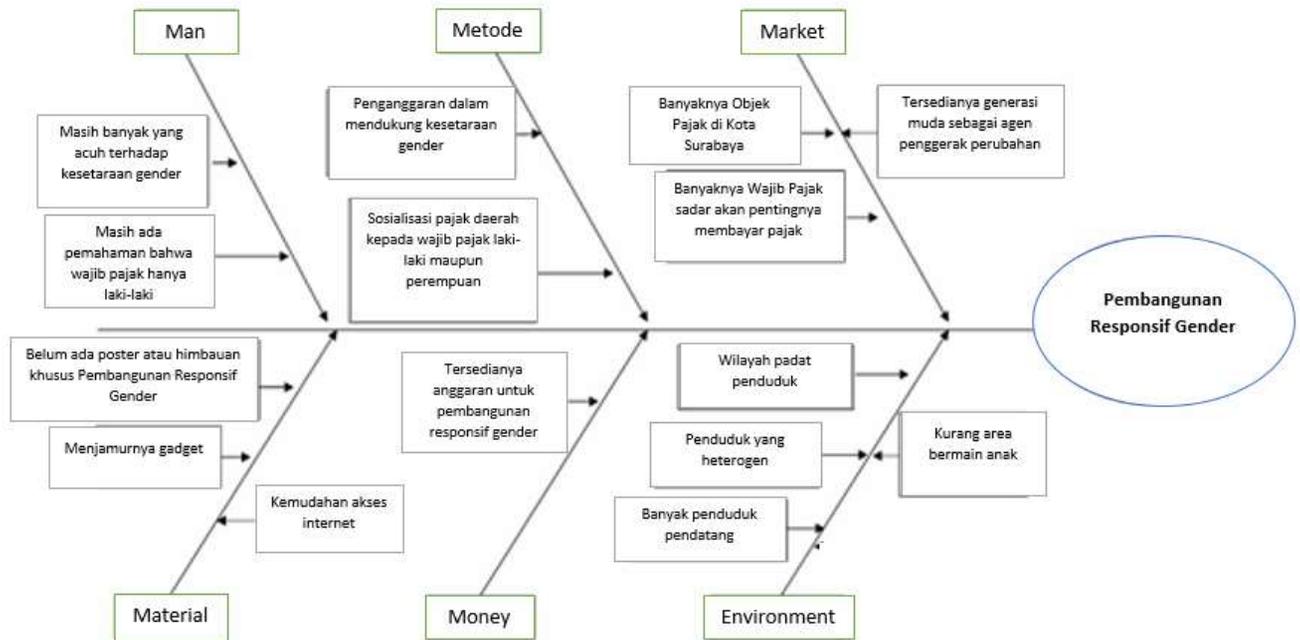
3.5 Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan PUG diatur pada diktum kedua huruf 6 Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2 /4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Pelaporan ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil Pelaksanaan PUG Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA
SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

- a. Perlu melibatkan semua masyarakat untuk menciptakan pembangunan responsif gender
- b. Perlu memperbanyak informasi tentang Pengarus Utaman Gender baik melalui media cetak atau media elektronik yang bisa diakses semua masyarakat
- c. Pemberdayaan generasi muda dalam penggerakan perubahan terutama pada pembangunan responsif gender.
- d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak laki-laki maupun perempuan

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

- a. Yang sudah dilaksanakan
 - Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuat wajib pajak laki-laki maupun perempuan patuh dalam membayar pajak
 - Pelayanan pembayaran pajak di tempat keramaian dan mobil keliling
- b. Rekomendasi/saran
 - Optimalisasi pelaksanaan pelayanan pajak yang responsif gender

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

a. E-SPPT PBB

Web e-SPPT PBB untuk Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan dapat mengecek besaran pajak dan dapat mencetak mandiri

b. Pemasangan Tax Surveillance

Pemasangan aplikasi Tax Surveillance untuk memudahkan petugas Badan Pendapatan Daerah laki-laki maupun perempuan dalam pengawasan pajak daerah

c. Pembayaran Pajak Daerah Online

Memudahkan Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pembayaran pajak daerah

d. Pelayanan Pelayanan Pajak Daerah di tempat keramaian seperti mall, pasar, kelurahan, Car Free Day

Kegiatan ini dilakuka untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah

Lampiran

1. SK PUG (Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya)
https://drive.google.com/drive/folders/1TVjeDOR3p2VJ_87_gTsoi44mhPfmITRN?usp=drive_link
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
 - Kegiatan sosialisasi pajak daerah
 - Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah di tempat keramaian seperti mall, pasar, kelurahan, Car Free Day
 - Kegiatan pengawasan objek pajak
 - Kegiatan Pemasangan Tax Surveillance
 - Kegiatan penempelan stiker barcode
 - Kegiatan Penempelan stiker objek pajak yang tidak patuh
 - Kegiatan dharma wanita
 - Kegiatan yasinan rutinhttps://drive.google.com/file/d/1EyAED-9g1bw9Q5SBgRx3ZeBZS8vjr9bA/view?usp=drive_link
3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir
https://drive.google.com/file/d/1EyAED-9g1bw9Q5SBgRx3ZeBZS8vjr9bA/view?usp=drive_link

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024